

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki kewajiban menyusun LKIP sesuai dengan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bima terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Bima. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan

terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Kota Bima, 17 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kota Bima,

Drs. Supratman.,M.Ap
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199203 1 163

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Bima berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2024-2026.

Hasil capaian 10 sasaran strategis, bahwa rata-rata persentase capaian sasaran berhasil. Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2024 dikategorikan berhasil sebesar 100 %.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 50.609.160.249 dari total anggaran sebesar Rp. 52.522.207.264 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan efisiensi anggaran sebesar 1.913.047.015 atau 3,64 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Sekretaris Daerah Kota Bima	3
1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia	5
1.4.2 Sumber Daya Aset/Modal.....	8
1.5 Aspek Strategis.....	9
1.6 Landasan Hukum.....	10
1.7 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategi Tahun 2024-2026	13
2.1.1 Visi.....	14
2.1.2 Misi	15
2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	21
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024.....	22
3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.2 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah	16
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan	18
Tabel 2. 3	Program dan Anggaran Tahun 2024	189
Tabel 3. 1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	20
Tabel 3. 2.	Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2024	20
Tabel 3. 3.	Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3. 4.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima.....	23
Tabel 3. 5	Produk hukum yang diterbitkan	31
Tabel 3. 6	Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2024.....	41
Tabel 3. 7	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Jumlah Pegawai Sekretaris Daerah berdasarkan Pendidikan.....	7
Grafik 1. 2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	7
Grafik 1. 3	Jumalaah Pegawai berdasarkan eselonering	8
Grafik 3. 1	Grafik kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	25
Grafik 3. 2	Nilai SAKIP Kota Bima	27
Grafik 3. 3.	Nilai LPPD Kota Bima 2017-2023	28
Grafik 3. 4	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas umum penyelenggaraan negara, meliputi : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota Bima dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kota Bima. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang

pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan Tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2024. LKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bima dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023/24 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Bima pada tahun yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Sekretaris Daerah Kota Bima

Sekretariat Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengeordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengeordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3) Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Bagian Umum

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 sebanyak 128 orang.

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 128 (seratus dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :

- 1. Golongan IVd : 1 (satu) orang
- 2. Golongan IVc : 4 (empat) orang
- 3. Golongan IVb : 1 (satu) orang
- 4. Golongan IVa : 7 (tujuh) orang
- 5. Golongan III : 105 (seratus lima) orang
- 6. Golongan II : 9 (sembilan) orang
- 7. Golongan I : 1 (satu) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari :

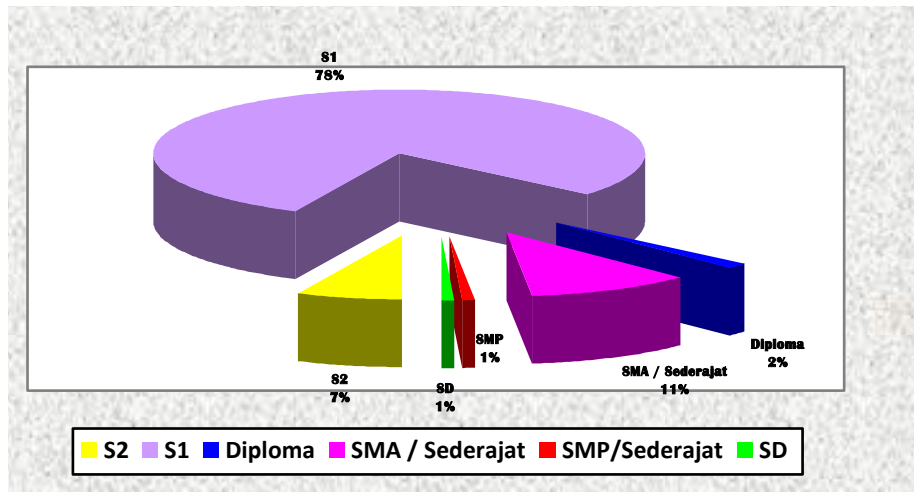
1. Eselon IIa : 1 (satu) orang
2. Eselon IIb : 5 (Lima) orang
3. Eselon III a : 9 (sembilan) orang
4. Eselon IV a : 2 (dua) orang
5. Kel. Fungsional : 23 (dua puluh tiga) orang
6. Staf : 88 (delapan puluh delapan) orang

C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 3 (S3) : -
2. Strata 2 (S2) : 9 (sembilan) orang
3. Strata 1 (S1) : 101 (seratus satu) orang
4. Sarjana Muda : 2 (dua) orang
5. SLTA : 14 (empat belas) orang
6. SMP : 1 (satu) orang
7. SD : 1 (satu) orang

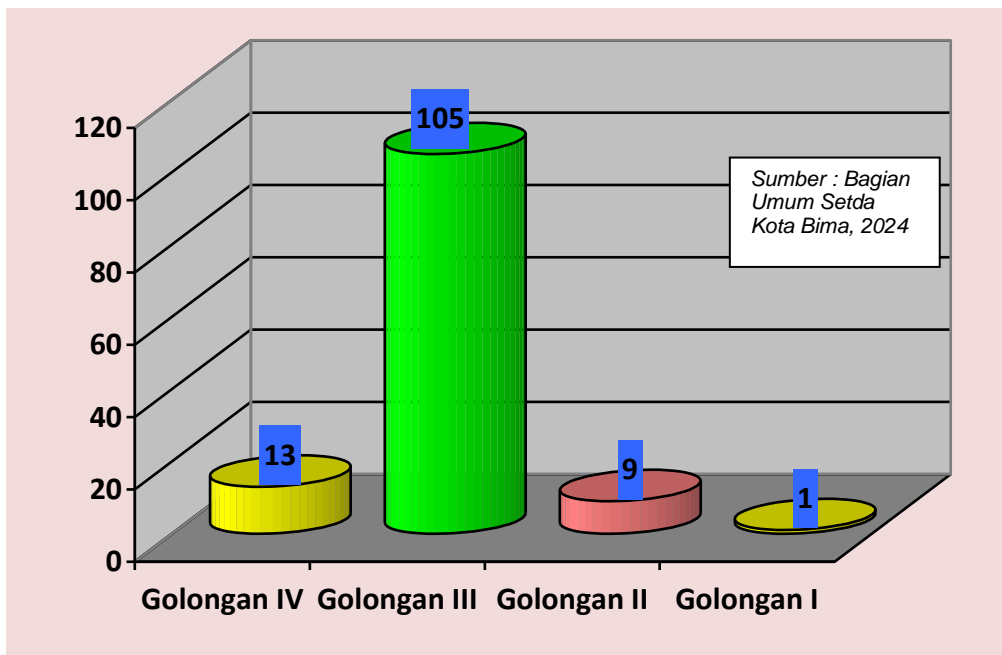
Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2024, keadaan pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bima dapat dilihat pada grafik dibawah berikut :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



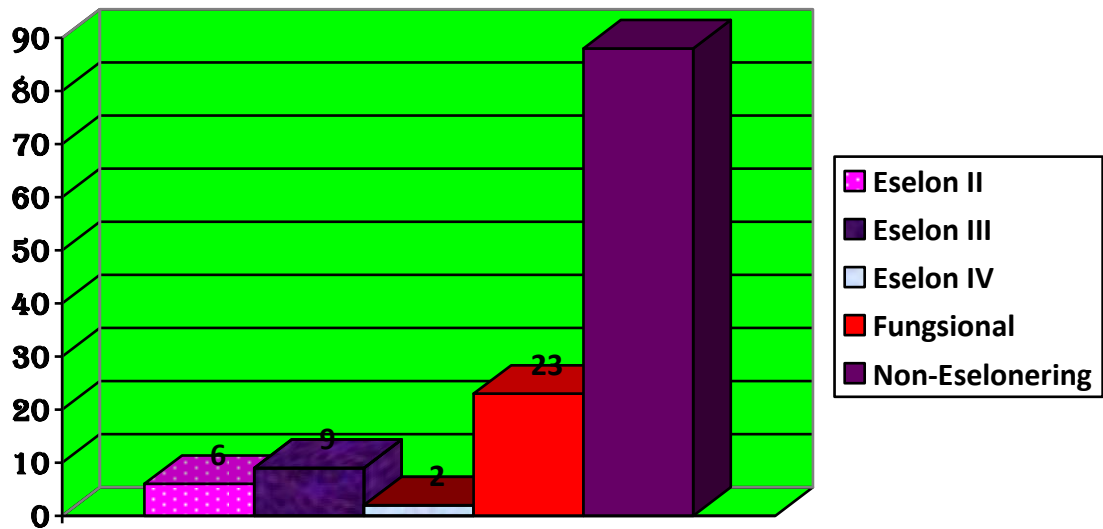
Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretaris Daerah berdasarkan Pendidikan

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan



Grafik 1. 2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering



Grafik 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan eselonering

1.4.2 Sumber Daya Aset/Modal

Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Sekretariat Daerah pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan I nternet, dan mesin faksimili;

3. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

1.5 Aspek Strategis

Bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (*Kekuatan dan Kelemahan*) serta Lingkungan Eksternal (*Peluang dan Tantangan*) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran* serta *Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran* yang berupa *Kebijakan, Program dan Kegiatan* dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini diwajibkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat untuk bertanggung jawab kepada publik.

1.6 Landasan Hukum

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum, antara lain;

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.7 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan sekretariat yang begitu besar dan luas dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian, dan kepala bagian ini akan bertanggung jawab kepada asisten dan asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah langsung.

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bima, antara lain :

1. Bidang Administrasi Pemerintahan
 - Indeks SAKIP dan LKIP masih rendah.

2. Bidang Perencanaan

- Proses perencanaan pembangunan belum berbasis kinerja
- Integrasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan baik
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD kurang berkualitas

3. Bidang Keuangan

- Penetapan target PAD belum sesuai potensi
- Proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum optimal
- Pelatihan dan sosialisasi tentang sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih kurang

4. Bidang Pengawasan

- Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Tahun 2024 - 2026

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2024 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bima, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima antara tahun 2024-2026;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima antara tahun 2024-2026;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi Sekretariat Daerah Kota Bima sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 – 2026 juga merupakan visi Kepala Daerah yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama (3) tiga tahun kedepan.

Visi Kepala Daerah Kota Bima periode 2024-2026 adalah **“Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri”**.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan suatu organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasionalnya, sehingga tidak menyimpang dari visi yang disepakati. Dalam mencapai visinya, Sekretariat Daerah Kota Bima telah menetapkan misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan dan merumuskan langkah selanjutnya.

Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah

Dalam rangka penjabaran visi dan misi tersebut, maka setiap misi perlu ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerjanya sehingga pelaksanaan setiap misi akan terukur secara jelas pada setiap tahapan

dan setiap waktu pelaksanaan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagaimana disajikan dalam tabel. 2.1. berikut ini.

Tabel 2. 1 Sasaran Sekretariat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3
1.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu
6.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan
7.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik
9.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah:

- a. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- e. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Untuk pencapaian sejumlah Indikator tersebut tentu diperlukan sumber anggaran sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Oleh karenanya jumlah anggaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	
1.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,80
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100
5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100
6.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	28,44
7.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100
9.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	80

Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.969.728.014
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.848.070.160
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.704.409.090
	JUMLAH	52.522.207.264

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Bima. Untuk memudahkan dalam menilai kinerja dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
(1)	(2)	(3)
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2023 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 .

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sangat Tinggi	7	78,00
2.	Tinggi	1	11,00
3.	Sedang	0	0

4.	Rendah	0	0
5.	Sangat Rendah	0	0
6.	Belum Rilis	1	11,00
Jumlah		10	100

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Bahwa pada Tahun 2024 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 9 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	68,48	67,10	98,04%
3	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Nilai	2,80	Belum Rilis	
4	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100,00%
5	Meningkatnya kepatuhan OPD	Persentase OPD yang menyampaikan	%	100	92,00	92,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu				
6	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	28,44	100	100,00%
7	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	Porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	100,00%
9	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	%	80	72,04	90,05%
Rata-Rata Capaian						

Kategori keberhasilan pencapaian Sasaran Sekretariat daerah sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 menunjukkan bahwa 9 sasaran Sekretariat daerah kategori berhasil.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024

Pengukuran Kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun

rincian dan analisis kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	85,00	67,42	79,20%	68,48	67,10	98,04%
3	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,220	2,7019	83,91	2,80	Belum Rilis	
4	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100%
5	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	92	92,00	100	92,00	92,00%
6	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	100	100	100	100	100	100%
7	Meningkatnya pelaksanaan	persentase kebijakan	%	100	100	100	100	100	100%

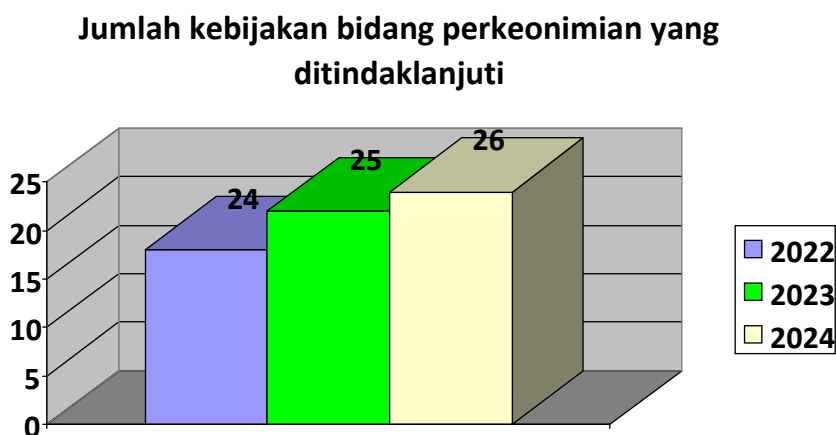
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti							
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	100	100	100	100%
9	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	%	80	78,95	98,69	80	72,04	90,05%
TOTAL									

Dari Tabel 3. 4 untuk Tahun 2024 belum dapat diketahui Rata-rata Capaian Kinerja karena ada satu indikator kinerja Nilai LPPD Belum Rilis. Secara garis besar sasaran strategis dikategorikan berhasil. Adapun Analisis Keberhasilan untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

3.1.2.1. Sasaran I : Meningkatkan Fasilitas Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis 1 Meningkatkan Fasilitas Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah dengan indikator Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori sangat tinggi. Capaian dapat terwujud dengan terlaksananya semua kebijakan bidang

perekonomian. Untuk lebih jelasnya jumlah kebijakan tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat dalam grafik 3. 1.



Grafik 3. 1 Grafik kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengendalian perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kerjasama daerah;
2. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan koordinasi secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian;
3. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Bima.

Faktor penghambat dalam pencapaian indeks perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SDM di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Bima belum ideal dari sisi kuantitas;
2. Masih adanya kegiatan di beberapa OPD yang tumpang tindih dengan OPD lainnya sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak optimal untuk meningkatkan perekonomian Kota Bima;

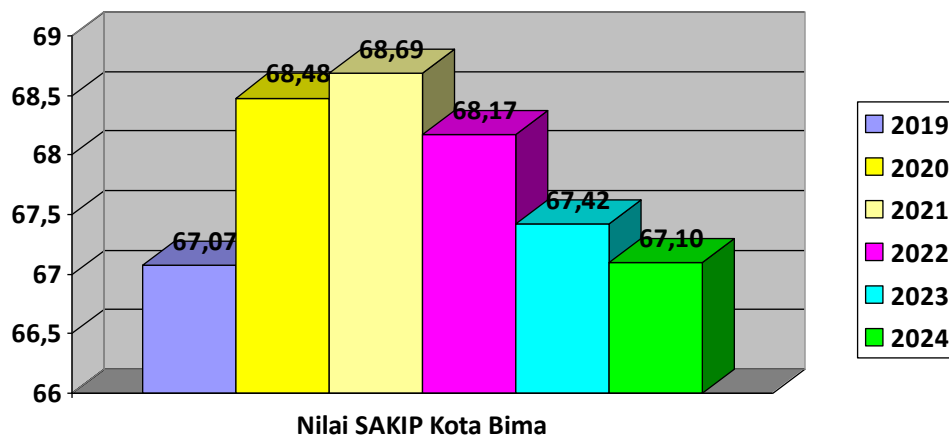
Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program perekonomian dan pembangunan.

3.1.2.2. Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Untuk Capaian sasaran Strategis 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator *Nilai Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Kota Bima pada Tahun 2024 memperoleh nilai 67,10 dengan capaian kinerja 98,04 % masuk kategori tinggi. Khusus Tahun 2024 nilai SAKIP Kota Bima diperoleh sebesar 67,10 poin dengan penurunan jumlah poin sebanyak 0,30 poin dibanding Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan nilai 67,42 poin.

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima ketika dibandingkan dengan target RPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 - 2026 untuk Tahun 2024 sebesar 68,48 dengan realisasi kinerja Sasaran indikator sebesar 67,10 dengan peringkat B, maka capaian kinerjanya adalah 98,04 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja

Adapun daftar rincian peningkatan nilai SAKIP selama 5 Tahun terakhir sebagaimana Grafik 3.1.

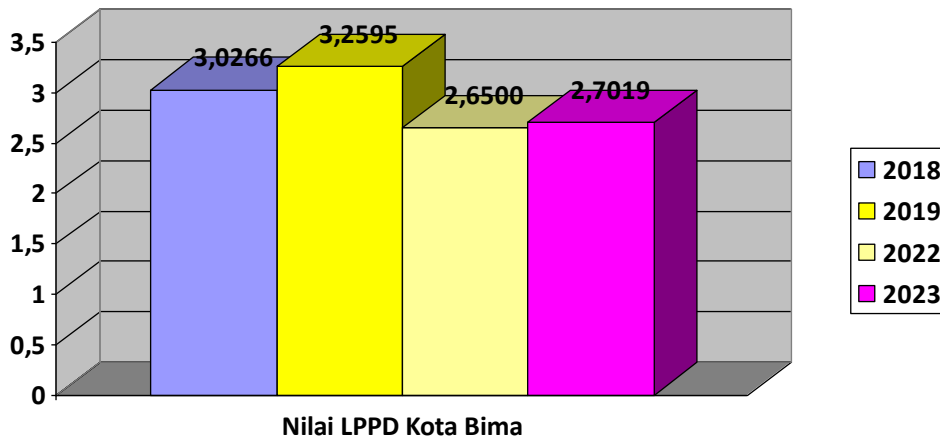


Grafik 3. 2 Nilai SAKIP Kota Bima

3.1.2.3. Sasaran III : Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis 3 Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah dengan indikator Nilai

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum memperoleh hasil (belum rilis).



Grafik 3. 3. Nilai LPPD Kota Bima 2017-2023

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
3. Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementrian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai LPPD adalah sebagai berikut :

1. Internal

- a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;
- b. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

2. Eksternal

- a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
- b. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;
- c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;
- d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar;

e. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

3.1.2.4. Sasaran IV : Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk Capaian sasaran Strategis 4 Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator *Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah* mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori berhasil.

Adapun Upaya yang dilakukan atas capaian tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memprakarsai rancangan produk hukum, sehingga dalam proses pembentukan produk hukum tidak terlalu mendapatkan kendala yang signifikan, dan dapat diundangkan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Bima (Pembentukan Perda) dan melaksanakan sesuai SOP dan Tata Naskah Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pembentukan produk hokum tersebut.

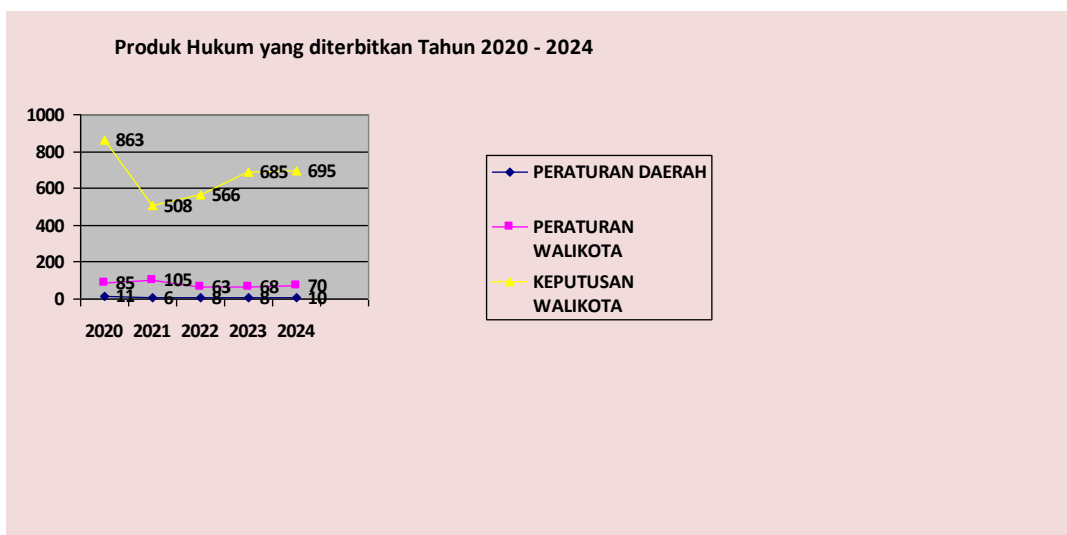
Disamping koordinasi, upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bima adalah melakukan konsultasi dengan Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB dan Biro Hukum Setda Provinsi NTB sebagai upaya penyelerasan dan harmonisasi substansi pengaturan produk hukum daerah.

Pemerintah Kota *Bima* pada Tahun 2024 menargetkan rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan sebanyak 10 Peraturan Daerah (Perda) dengan realisasi sebanyak 10 Perda yang sudah diundangkan. Realisasi capaian Produk Hukum yang diterbitkan dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3. 5 Produk hukum yang diterbitkan

TAHUN	PERATURAN DAERAH	PERATURAN WALIKOTA	KEPUTUSAN WALIKOTA
1	2	3	4
2020	11	85	863
2021	6	105	508
2022	8	63	566
2023	8	68	685
2024	10	70	695



Grafik 3. 4 Produk Hukum Daerah yang di terbitkan

3.1.2.5. Sasaran V : Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan

Untuk capaian sasaran strategis 5 Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dengan indikator *Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu* mendapatkan capaian kinerja sebesar 92,00 %. Capaian ini belum mencapai target yang diharapkan karena terkendala dari beberapa kegiatan pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan di lapangan, selain itu juga bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan OPD terhadap penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan adalah kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan.

Faktor pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi kepada Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara rutin dan intensif;
2. Mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik di lapangan yang mengakibatkan target pelaksanaan tidak tercapai;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan setiap bulan dan setiap triwulan;

4. Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan;
5. Fasilitasi kepada PPTK maupun admin Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam aplikasi pelaporan secara real time atau tepat waktu;
6. Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
7. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah mengenai evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran, yang dilakukan secara per triwulan.

Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator Sasaran Tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, diantaranya :

1. Keterlambatan progress pekerjaan fisik dilapangan
2. Tidak adanya target yang ditentukan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga proses pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerap kali dilakukan bersamaan diakhir tahun.
3. Keterlambatan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan.

3.1.2.6. Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator Sasaran strategis terhadap target hasil dalam berapa tahun ditunjukkan dengan

besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, atautkah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2024. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa melalui ULP, ini merupakan indikator yang cara mengukurnya dilakukan dengan menghitung jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan dibagi total belanja modal dan operasional dikali seratus persen.

Dalam hal ini dalam mengukur rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan formula Indikatornya adalah jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan dibagi total

belanja modal dan operasional dikali seratus persen dan diperoleh hasil 29,52 % melebihi target yang ditetapkan 2024 yaitu 28,44%.

Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	28,44%	29,52%	103,8%

Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP, Indikator Prosentase PBJ yang tepat waktu ukuran ini merupakan indikator yang cara mengukurnya dilakukan dengan menghitung jumlah paket pekerjaan/tender yang dimasukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke UKPBJ.

Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 berjalan lancar, tender sampai dengan semester 2 sejumlah 46 paket Tender, semua tender diproses dan dapat diselesaikan dengan baik oleh UKPBJ.

Dalam hal ini formula Indikatornya adalah jumlah paket pekerjaan/tender yang diproses UKPBJ dibagi dengan jumlah paket pekerjaan/tender yang dimasukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke UKPBJ adalah 100% dan diperoleh hasil 100%

Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu.	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik Tender maupun Pengadaan Langsung melalui LPSE dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagai dasar penerapan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Layanan ini dilaksanakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yang secara nasional dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun beberapa tugas LKPP termasuk mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dan

menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Formula indikator kinerja utama Persentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada LPSE, Website resmi Pemkot, website resmi OPD dan papan pengumuman adalah Jumlah OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online dibagi seluruh PD yang ada dilingkup Pemerintah Kota Bima (34 Perangkat Daerah) dikalikan 100%.

Jika Jumlah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Bima adalah 34 OPD dan semua (34 OPD) tersebut telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di sirup.lkpp.go.id maka formula perhitungan $\frac{34 \text{ OPD}}{34 \text{ OPD}} \times 100\%$ diperoleh hasil 100 %, maka capaian indikator kinerja utama 2 ini adalah 100% karena Pemerintah Kota Bima melalui Surat Edaran Walikota Bima Tahun 2021 sudah mewajibkan pada seluruh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bima menerapkan proses pengadaan barang/jasa pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dari LPSE. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE memfasilitasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi :

1. PA/KPA untuk mengumumkan rencana umum pengadaan
2. Pokmil untuk menayangkan pengumuman pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa.
3. Pokmil/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
4. Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE

Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada situs LPSE LKPP, SiRUP LKPP dan Web resmi Pemkot Bima	100%	100%	100%

Secara garis besar capaian Sasaran Strategis Sekretaris Daerah yang ke 6 yaitu Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara online meperoleh capain kinerja sebesar 100%. Sebagai pembanding pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2024

Tahun	Tender	Pengadaan Langsung	Total
1	2	3	4
2024	46	459	505

Tahun	Pengadaan Online	Pengadaan non online
1	2	3
2017	109	785
2018	71	721
2019	775	
2020	357	
2021	423	
2022	506	
2023	464	
2024	505	

3.1.2.7. Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis ke 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan

Prasaran dalam kondisi baik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori Sangat Tinggi.

3.1.2.8. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan

Untuk Capaian sasaran Strategis ke 8 Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori Sangat Tinggi.

3.1.2.9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama

Untuk Capaian sasaran Strategis 9 Meningkatnya Pengamalan ajaran Agama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama mendapatkan capaian kinerja sebesar 72,04% atau masuk kategori tinggi.

Capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah yang ke 9 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengamalan Ajaran Agama dengan indikator Skor Rata-rata Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target Tahun 2023 sebesar 80 % (kategori tinggi) memperoleh realisasi sebesar 78,95% (kategori Tinggi) dengan capaian kinerja perangkat Daerah sebesar 98,69%.

Dari Hasil survei terhadap nilai Toleransi, kesetaraan dan Kerjasama umat beragama terhadap pengamalan ajaran agama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima tahun 2024 diperoleh nilai

indeks survei 72,04 atau kategori tinggi lebih menurun dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya di Tahun 2023 yaitu dengan nilai indeks 78,95 dengan capaian kinerja 98,69 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya pembinaan, Pelaksanaan serta kepentingan politik, SDM yang terbatas dan pengaruh media social akan tetapi Fasilitasi sarana dan prasarana terhadap kerukunan umat beragama tidak mengurangi hak dasar masing-masing dalam melaksanakan kewajiban agamanya (toleransi). Jadi kesimpulannya, Terdapat hubungan antara pendidikan agama, pendapatan, aktif bersosialisasi, kearifan lokal, dan kesetaraan peran Pemerintah Daerah terhadap sikap rukun umat beragama walaupun faktor non-keagamaan lebih berdampak seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun).

3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.1. Anggaran

Untuk mencapai target Sembilan indikator yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Bima menganggarkan belanja langsung tahun 2024 sebesar Rp 52.522.207.264. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 50.609.160.249 atau 96,36 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bima telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.913.047.015 atau 3,64 %.

3.1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional roda empat dan roda dua, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan sebesar Rp. 52.522.207.264. (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 50.609.160.249 (*Lima Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*). Sehingga bila dihitung capaiannya sebesar 96,36 %.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.969.728.014,00	32.867.350.813,00	96,75
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.504.000,00	12.504.000,00	100,00
	a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.648.000,00	1.648.000,00	100,00
	a.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	100,00
	a.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	100,00
	a.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	100,00
	a.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	100,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.908.677.401,00	16.619.018.052,00	98,29
	b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.240.105.151,00	15.988.623.952,00	98,45
	b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	663.939.250,00	625.761.100,00	94,25
	b.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.843.000,00	1.843.000,00	100,00
	b.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.790.000,00	2.790.000,00	100,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.334.400,00	23.302.600,00	99,86
	c.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.334.400,00	23.302.600,00	99,86
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.047.558.770,00	2.043.556.432,00	99,80
	d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.886.600,00	98.886.300,00	100,00
	d.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.698.310,00	129.661.100,00	99,97
	d.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.391.800,00	114.373.900,00	99,98
	d.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	d.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.191.987.050,00	1.189.649.240,00	99,80
	d.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.595.010,00	510.985.892,00	99,69
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.007.497.250,00	2.957.370.000,00	98,33
	e.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.618.117.250,00	2.576.590.000,00	98,41
	e.2 Pengadaan Mebel	389.380.000,00	380.780.000,00	97,79
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.372.004.931,00	3.211.839.045,00	95,25
	f.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	372.855.100,00	369.250.100,00	99,03

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
	f.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.315.271.651,00	1.325.470.745,00	100,78
	f.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.683.878.180,00	1.517.118.200,00	90,10
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.044.804.000,00	2.008.779.071,00	98,24
	g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	532.970.000,00	515.117.771,00	96,65
	g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842.110.000,00	830.950.686,00	98,67
	g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.510.000,00	271.934.292,00	97,64
	g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.294.000,00	365.292.122,00	100,00
	g.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.920.000,00	25.484.200,00	98,32
	h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	806.937.962,00	463.266.003,00	57,41
	h.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	335.938.362,00	51.450.000,00	15,32
	h.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00
	h.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	170.000.000,00	110.816.403,00	65,19
	h.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.999.600,00	219.999.600,00	100,00
	i. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.122.510.900,00	1.018.528.610,00	90,74
	i.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	960.008.000,00	865.234.650,00	90,13
	i.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
	i.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162.502.900,00	153.293.960,00	94,33
	j. Penataan Organisasi	1.068.125.400,00	1.013.644.710,00	94,90
	j.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	403.179.100,00	351.355.500,00	87,15
	j.2 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.262.300,00	112.395.300,00	99,23
	j.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	63.065.650,00	62.277.250,00	98,75
	j.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	62.904.000,00	62.593.310,00	99,51

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
	j.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	425.714.350,00	425.023.350,00	99,84
	k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.555.773.000,00	3.495.542.290,00	98,31
	k.1 Fasilitasi Keprotokolan	2.286.060.000,00	2.285.863.834,00	99,99
	k.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	833.582.500,00	825.749.456,00	99,06
	k.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	436.130.500,00	383.929.000,00	88,03
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.848.070.160,00	14.152.968.018,00	95,32
	a. Administrasi Tata Pemerintahan	1.772.376.760,00	1.606.617.454,00	90,65
	a.1 Penataan Administrasi Pemerintahan	632.129.560,00	525.026.679,00	83,06
	a.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	558.515.300,00	528.462.385,00	94,62
	a.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	581.731.900,00	553.128.390,00	95,08
	b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.764.110.400,00	11.239.656.155,00	95,54
	b.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.646.477.800,00	10.244.887.655,00	96,23
	b.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	237.258.800,00	233.105.700,00	98,25
	b.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	880.373.800,00	761.662.800,00	86,52
	c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.311.583.000,00	1.306.694.409,00	99,63
	c.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	705.235.000,00	704.619.970,00	99,91
	c.2 Fasilitasi Bantuan Hukum	264.532.000,00	263.795.940,00	99,72
	c.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	341.816.000,00	338.278.499,00	98,97
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.704.409.090,00	3.588.841.418,00	96,88
	a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	586.015.342,00	579.594.704,00	98,90
	a.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	108.726.300,00	108.673.236,00	99,95
	a.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	284.394.700,00	282.599.126,00	99,37
	a.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	129.171.942,00	124.599.942,00	96,46
	a.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	63.722.400,00	63.722.400,00	100,00
	a.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0,00	0,00	0,00
	b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.452.446.190,00	1.444.223.230,00	99,43
	b.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	72.431.250,00	71.627.000,00	98,89
	b.2 Pengendalian dan Evaluasi Program	1.235.788.900,00	1.232.581.130,00	99,74

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan			
	b.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	144.226.040,00	140.015.100,00	97,08
	c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.496.596.000,00	1.404.031.657,00	93,82
	c.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	395.415.800,00	394.406.500,00	99,74
	c.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	365.469.900,00	362.381.300,00	99,15
	c.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	735.710.300,00	647.243.857,00	87,98
	d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	169.351.558,00	160.991.827,00	95,06
	d.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	79.276.795,00	77.853.700,00	98,20
	d.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
	d.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	90.074.763,00	83.138.127,00	92,30
	Total	52.522.207.264,00	50.609.160.249,00	96,36

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						46.483.271.758,00	52.522.207.264,00	50.609.160.249,00	1.913.047.015,00	96,36
Sekretariat Daerah						46.483.271.758,00	52.522.207.264,00	50.609.160.249,00	1.913.047.015,00	96,36
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100,00	Porsen	100,00	100,00	29.079.277.358,00	33.969.728.014,00	32.867.350.813,00	1.102.377.201,00	96,75
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100	Porsen	100	100,00	12.504.000,00	12.504.000,00	12.504.000,00	0,00	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	100,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	100,00	16.310.410.167,00	16.908.677.401,00	16.619.018.052,00	289.659.349,00	98,29

URAIAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120,00	Orang/bulan	120,00	100,00	15.674.837.667,00	16.240.105.151,00	15.988.623.952,00	251.481.199,00	98,45
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	3,00	100,00	630.939.500,00	663.939.250,00	625.761.100,00	38.178.150,00	94,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	100,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD	18,00	Laporan	18,00	100,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,00	Porsen	100,00	100,00	15.334.200,00	23.334.400,00	23.302.600,00	31.800,00	99,86
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	6,00	100,00	15.334.200,00	23.334.400,00	23.302.600,00	31.800,00	99,86
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	Porsen	100,00	100,00	1.526.736.376,00	2.047.558.770,00	2.043.556.432,00	4.002.338,00	99,80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	63.889.100,00	98.886.600,00	98.886.300,00	300,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1,00	Paket	1,00	100,00	94.710.075,00	129.698.310,00	129.661.100,00	37.210,00	99,97

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
	Disediakan									
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	74.391.900,00	114.391.800,00	114.373.900,00	17.900,00	99,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	12,00	100,00	942.147.050,00	1.191.987.050,00	1.189.649.240,00	2.337.810,00	99,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,00	Laporan	54,00	100,00	351.598.251,00	512.595.010,00	510.985.892,00	1.609.118,00	99,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00		100,00	100,00	1.325.580.000,00	3.007.497.250,00	2.957.370.000,00	50.127.250,00	98,33
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2,00	Unit	2,00	100,00	1.150.000.000,00	2.618.117.250,00	2.576.590.000,00	41.527.250,00	98,41
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	unit	30,00	100,00	175.580.000,00	389.380.000,00	380.780.000,00	8.600.000,00	97,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Porsen	100,00	100,00	2.799.715.880,00	3.372.004.931,00	3.211.839.045,00	160.165.886,00	95,25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	4,00	100,00	295.564.900,00	372.855.100,00	369.250.100,00	3.605.000,00	99,03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	100,00	769.888.800,00	1.315.271.651,00	1.325.470.745,00	-10.199.094,00	100,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	100,00	1.734.262.180,00	1.683.878.180,00	1.517.118.200,00	166.759.980,00	90,10
Pemeliharaan Barang	Persentase pemenuhan	100,00	Porsen	100,00	100,00	1.584.473.000,00	2.044.804.000,00	2.008.779.071,00	36.024.929,00	98,24

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan Barang Milik Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	Unit	24,00	100,00	450.630.000,00	532.970.000,00	515.117.771,00	17.852.229,00	96,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	Unit	28,00	100,00	653.470.000,00	842.110.000,00	830.950.686,00	11.159.314,00	98,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211,00	Unit	211,00	100,00	201.210.000,00	278.510.000,00	271.934.292,00	6.575.708,00	97,64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	Unit	10,00	100,00	210.097.000,00	365.294.000,00	365.292.122,00	1.878,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3,00	Unit	3,00	1000,00	69.066.000,00	25.920.000,00	25.484.200,00	435.800,00	98,32
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	Porsen	0,00	100,00	1.182.399.585,00	806.937.962,00	463.266.003,00	343.671.959,00	57,41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	100,00	521.399.585,00	335.938.362,00	51.450.000,00	284.488.362,00	15,32

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,00	Paket	1,00	100,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,00	Orang	10,00	100,00	180.000.000,00	170.000.000,00	110.816.403,00	59.183.597,00	65,19
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	100,00	400.000.000,00	219.999.600,00	219.999.600,00	0,00	100,00
	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100,00	Porsen	100,00	100,00	1.173.972.900,00	1.122.510.900,00	1.018.528.610,00	103.982.290,00	90,74
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,00	Paket	1,00	100,00	1.010.008.000,00	960.008.000,00	865.234.650,00	94.773.350,00	90,13
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	162.502.900,00	162.502.900,00	153.293.960,00	9.208.940,00	94,33
	Penataan Organisasi	100,00	Porsen	100,00	100,00	449.378.250,00	1.068.125.400,00	1.013.644.710,00	54.480.690,00	94,90
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,00	Dokumen	10,00	100,00	197.265.950,00	403.179.100,00	351.355.500,00	51.823.600,00	87,15
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1,00	Laporan	1,00	100,00	63.128.300,00	113.262.300,00	112.395.300,00	867.000,00	99,23
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi	2,00	Dokumen	2,00	100,00	63.065.650,00	63.065.650,00	62.277.250,00	788.400,00	98,75

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Birokrasi	Reformasi Birokrasi									
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4,00	Dokumen	4,00	100,00	62.904.000,00	62.904.000,00	62.593.310,00	310.690,00	99,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2,00	Dokumen	2,00	100,00	63.014.350,00	425.714.350,00	425.023.350,00	691.000,00	99,84
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00	Porsen	100,00	100,00	2.698.773.000,00	3.555.773.000,00	3.495.542.290,00	60.230.710,00	98,31
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900,00	Laporan	900,00	100,00	1.816.060.000,00	2.286.060.000,00	2.285.863.834,00	196.166,00	99,99
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10,00	Laporan	10,00	100,00	541.582.500,00	833.582.500,00	825.749.456,00	7.833.044,00	99,06
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12,00	Laporan	12,00	100,00	341.130.500,00	436.130.500,00	383.929.000,00	52.201.500,00	88,03
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		100,00	Porsen	100,00	100,00	14.452.018.150,00	14.848.070.160,00	14.152.968.018,00	695.102.142,00	95,32
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100,00	Porsen	100,00	100,00	1.925.476.750,00	1.772.376.760,00	1.606.617.454,00	165.759.306,00	90,65
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7,00	Dokumen	7,00	100,00	500.229.550,00	632.129.560,00	525.026.679,00	107.102.881,00	83,06
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3,00	Dokumen	3,00	100,00	978.515.300,00	558.515.300,00	528.462.385,00	30.052.915,00	94,62
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4,00	Dokumen	4,00	100,00	446.731.900,00	581.731.900,00	553.128.390,00	28.603.510,00	95,08
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18,00	Porsen	100,00	100,00	11.438.958.400,00	11.764.110.400,00	11.239.656.155,00	524.454.245,00	95,54
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	13,00	Dokumen	13,00	100,00	10.358.985.500,00	10.646.477.800,00	10.244.887.655,00	401.590.145,00	96,23

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
	Bina Mental Spiritual									
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3,00	Dokumen	3,00	100,00	219.139.100,00	237.258.800,00	233.105.700,00	4.153.100,00	98,25
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2,00	Dokumen	2,00	100,00	860.833.800,00	880.373.800,00	761.662.800,00	118.711.000,00	86,52
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100,00	Porsen	100,00	100,00	1.087.583.000,00	1.311.583.000,00	1.306.694.409,00	4.888.591,00	99,63
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	655,00	Dokumen	655,00	100,00	511.435.000,00	705.235.000,00	704.619.970,00	615.030,00	99,91
	Fasilitasi Bantuan Hukum	2,00	Kasus	2,00	100,00	274.232.000,00	264.532.000,00	263.795.940,00	736.060,00	99,72
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	90,00	Dokumen	90,00	100,00	301.916.000,00	341.816.000,00	338.278.499,00	3.537.501,00	98,97

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100,00	Porsen	100,00	100,00	2.951.976.250,00	3.704.409.090,00	3.588.841.418,00	115.567.672,00	96,88
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100,00	Porsen	100,00	100,00	448.378.600,00	586.015.342,00	579.594.704,00	6.420.638,00	98,90
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5,00	Dokumen	5,00	100,00	73.726.300,00	108.726.300,00	108.673.236,00	53.064,00	99,95
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4,00	Laporan	4,00	100,00	249.394.700,00	284.394.700,00	282.599.126,00	1.795.574,00	99,37
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	8,00	Dokumen	8,00	100,00	68.815.000,00	129.171.942,00	124.599.942,00	4.572.000,00	96,46
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	56.442.600,00	63.722.400,00	63.722.400,00	0,00	100,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	100,00	Porsen	100,00	0,00	1.254.984.750,00	1.452.446.190,00	1.444.223.230,00	8.222.960,00	99,43
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1,00	Dokumen	1,00	100,00	73.706.250,00	72.431.250,00	71.627.000,00	804.250,00	98,89
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6,00	Laporan	6,00	100,00	1.034.053.000,00	1.235.788.900,00	1.232.581.130,00	3.207.770,00	99,74
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	Laporan	16,00	100,00	147.225.500,00	144.226.040,00	140.015.100,00	4.210.940,00	97,08
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan	154,00	Porsen	100,00	100,00	1.136.624.600,00	1.496.596.000,00	1.404.031.657,00	92.564.343,00	93,82

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2024)	Satuan	Realisasi Capaian (2024)	Capaian (%)	PAGU 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
	Barang dan Jasa									
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,00	Dokumen	72,00	100,00	228.814.100,00	395.415.800,00	394.406.500,00	1.009.300,00	99,74
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	36,00	Dokumen	36,00	100,00	353.968.500,00	365.469.900,00	362.381.300,00	3.088.600,00	99,15
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46,00	Orang	46,00	100,00	553.842.000,00	735.710.300,00	647.243.857,00	88.466.443,00	87,98
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00	Porsen	100,00	100,00	111.988.300,00	169.351.558,00	160.991.827,00	8.359.731,00	95,06
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4,00	Dokumen	4,00	100,00	34.286.900,00	79.276.795,00	77.853.700,00	1.423.095,00	98,20
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4,00	Dokumen	4,00	100,00	77.701.400,00	90.074.763,00	83.138.127,00	6.936.636,00	92,30
						46.483.271.758,00	52.522.207.264,00	50.609.160.249,00	1.913.047.015,00	96,36

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2024. Hasil dari penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024 dapat dimanfaatkan sebagai feedback dalam perencanaan periode berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Sebagai Penutup dari laporan kinerja Sekretariat daerah Kota Bima tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian Kinerja yang Signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil Analisis pencapaian indikator sekretariat Daerah sangat tinggi.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 50.609.160.249 dari total anggaran sebesar Rp. 52.522.207.264 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan efisiensi anggaran sebesar 1.913.047.015 atau 3,64 %.

4.2 Saran

Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2024 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Bima secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Bima pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.